



# Dampak Ekonomi dan Skema Pembiayaan Pemindahan Ibu Kota Negara

Oleh:

Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas

dalam Dialog Nasional II:

Menuju Ibu Kota Masa Depan: *Smart, Green and Beautiful*

Rabu, 26 Juni 2019



# Outline

**1. Mengapa Ibu Kota harus pindah ke Luar Jawa**

**2. Analisis Dampak Ekonomi**

**3. Skema Pembiayaan**



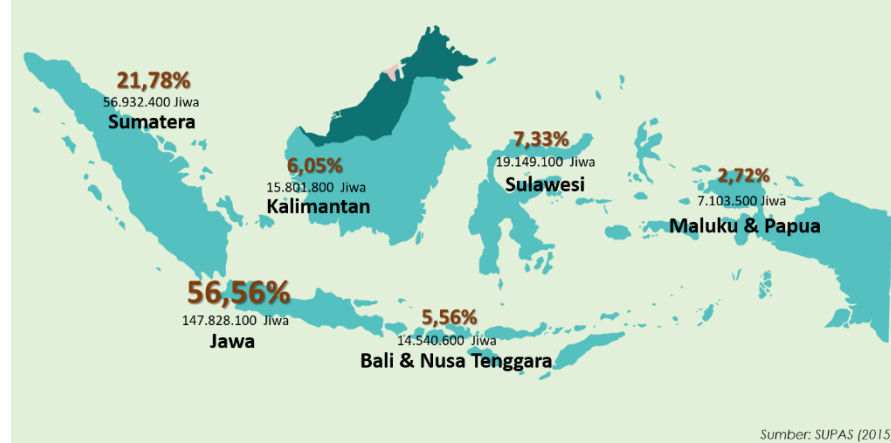
1

Mengapa Ibu Kota harus pindah ke Luar Jawa?



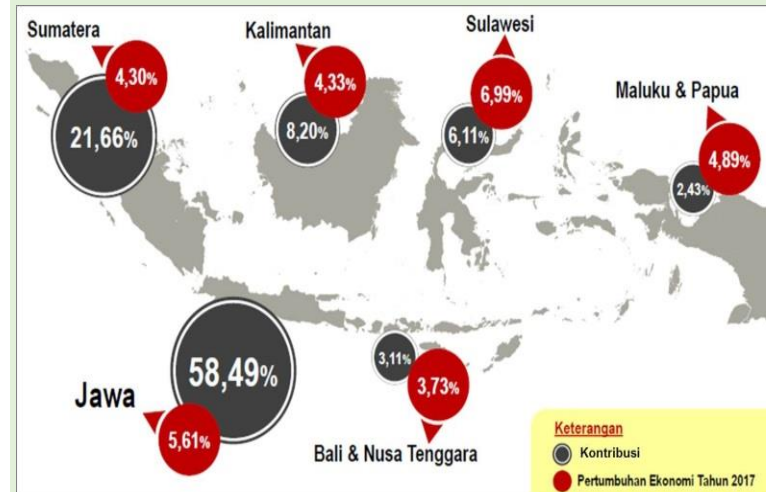
# Mengapa Ibu Kota harus pindah ke Luar Jawa? (1/2)

## 1 Sekitar 57% Penduduk Indonesia terkonsentrasi di Pulau Jawa



Pulau Jawa memiliki jumlah penduduk tertinggi, 56,56% dari total jumlah penduduk Indonesia, sementara itu daerah-daerah lain memiliki jumlah penduduk sangat rendah (<10%) kecuali Pulau Sumatera

## 2 Kontribusi Ekonomi per Pulau terhadap PDB Nasional



Sumber: Badan Pusat Statistik (2018)

Kontribusi Ekonomi Pulau Jawa terhadap PDB Nasional 58,49%, Share PDRB Jabodetabek terhadap PDB Nasional 20,85%.

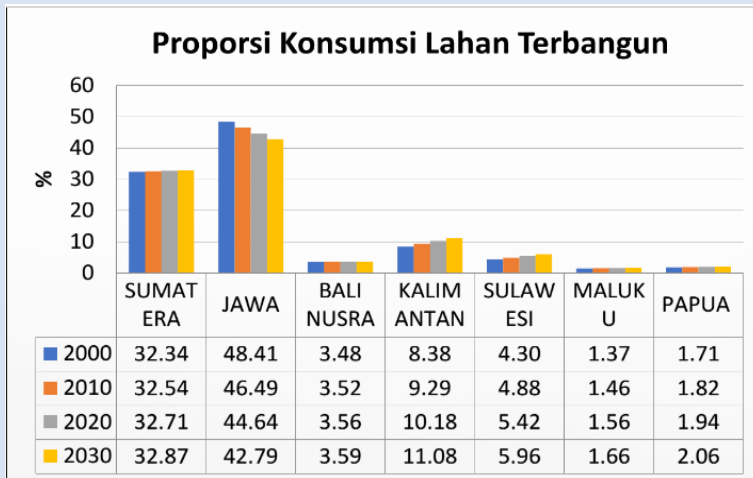
## 3 Krisis Ketersediaan Air di Pulau Jawa terutama DKI Jakarta dan Jawa Timur



Ketersediaan Air WS berdasarkan klasifikasi ketersediaan air perkapita  
Sumber: Kementerian PUPR (2016)

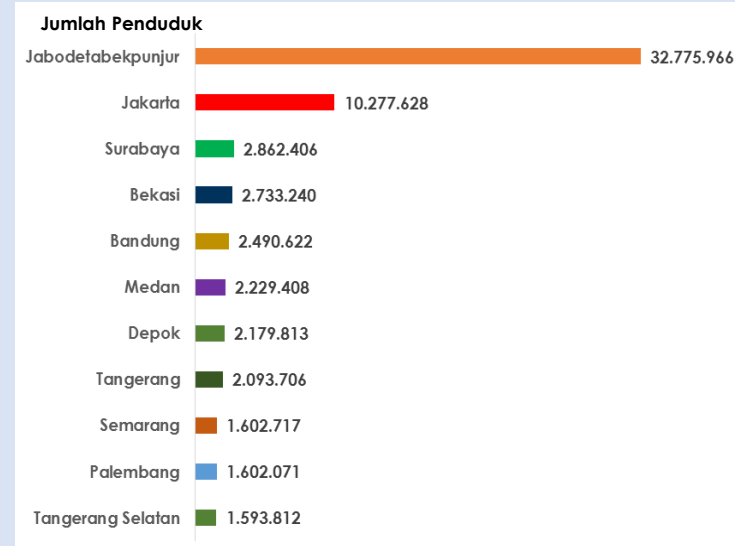
# Mengapa Ibu Kota harus pindah ke Luar Jawa? (2/2)

## 4 Konversi Lahan terbesar terjadi di Pulau Jawa



Sumber: Hasil Modelling KLHS Bappenas, 2019

## 5 Pertumbuhan urbanisasi yang sangat tinggi, dengan konsentrasi penduduk terbesar di *Jakarta* dan *Jabodetabekpunjur*



## 6 Meningkatnya beban *Jakarta*: sehingga terjadi penurunan daya dukung lingkungan dan besarnya kerugian ekonomi

- ✓ Rawan banjir
- ✓ Tanah turun dan muka air laut naik
- ✓ Kualitas air sungai 96% tercemar berat
- ✓ Kemacetan tinggi dan sistem pengelolaan transportasi sangat buruk
- ✓ Kerugian ekonomi akibat kemacetan mencapai Rp 56 triliun per tahun (PUSTRAL-UGM 2013)



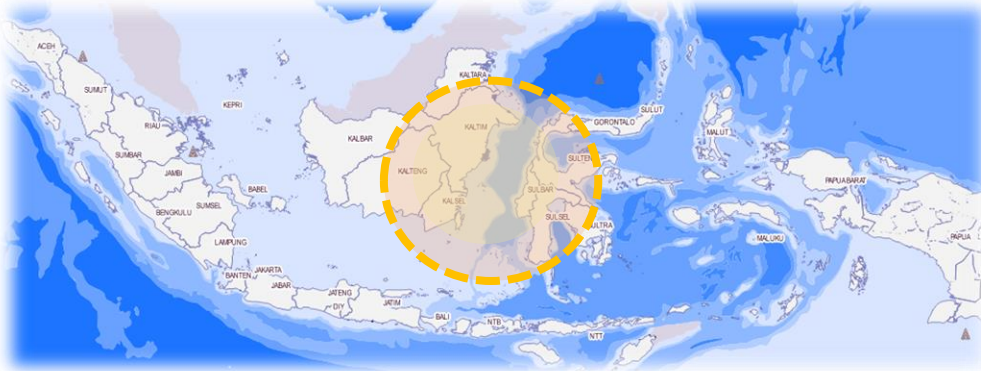
# Ibu Kota Baru Sebagai Representasi Identitas Bangsa



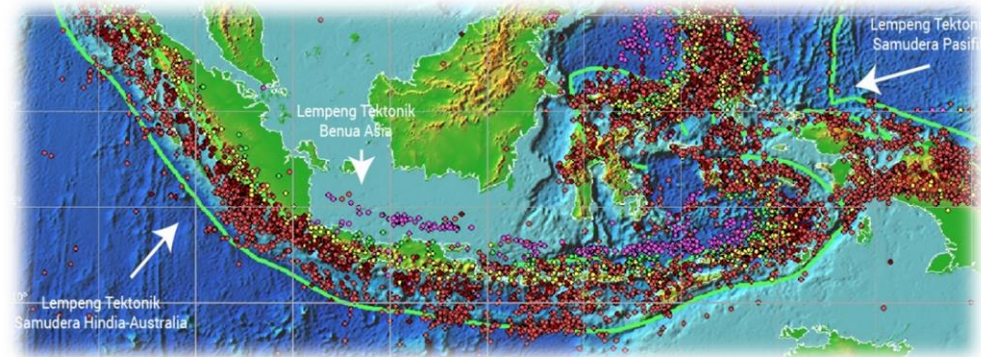
1. Ibu Kota Baru sebagai Simbol Identitas Bangsa
2. Ibu Kota Negara yang *Green, Smart, Beautiful*, dan *Sustainable*
3. Ibu Kota Negara yang Modern dan berstandar Internasional
4. Ibu Kota Negara dengan tata kelola pemerintahan yang efisien dan efektif



# Kriteria Penentuan Lokasi Ibu Kota Negara



Lokasi Strategis yang berada di tengah wilayah Indonesia (*Indonesia Centris*).



Lokasi aman dan bebas terhadap Risiko Bencana gempa bumi, gunung berapi dan tsunami

- ❑ **Lokasi Strategis**, secara geografis **berada di tengah wilayah Indonesia** untuk merepresentasikan keadilan dan mendorong percepatan pengembangan wilayah KTI (**Indonesia Centris**).
- ❑ **Tersedia lahan luas** milik pemerintah/BUMN Perkebunan untuk mengurangi biaya investasi.
- ❑ Lahan harus **bebas bencana gempa bumi, gunung berapi, tsunami, banjir, erosi, serta kebakaran hutan dan lahan gambut**
- ❑ **Tersedia sumber daya air** yang cukup dan bebas pencemaran lingkungan
- ❑ **Dekat dengan kota eksisting yang sudah berkembang** untuk efisiensi investasi awal infrastruktur.
  - ✓ Akses mobilitas/logistik : bandara, pelabuhan dan jalan.
  - ✓ Ketersediaan pelabuhan laut dalam sangat penting untuk mewujudkan **Indonesia sebagai negara maritim** melalui konektivitas tol laut antar pulau.
  - ✓ Tingkat layanan air minum, sanitasi, listrik, dan jaringan komunikasi yang memadai untuk dikembangkan
- ❑ **Potensi konflik sosial** rendah dan memiliki **budaya terbuka terhadap pendatang**, serta memiliki dampak negatif minimal terhadap komunitas lokal.
- ❑ Memenuhi **perimeter pertahanan dan keamanan**, terutama (a) *to minimize vulnerability of State*; (b) *Safeguard its territorial*; (c) *help to gain Regional and International Affairs*; (d) Tidak dekat wilayah perbatasan negara.



# 2

## Analisis Dampak Ekonomi





# Pemindahan IKN Akan Memberikan Dampak Positif Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Nasional

Pemindahan ibu kota ke lokasi baru di luar Jawa **tidak akan memberikan dampak negatif terhadap perekonomian nasional**



Dampak pemindahan ibu kota baru terhadap perekonomian nasional adalah:

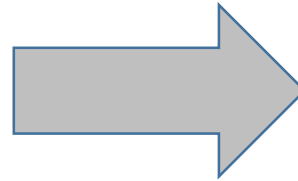
**Real GDP:** **+ 0.1%**  
*nasional*

- Efek positif tersebut **disebabkan adanya penggunaan dari sumber daya potensial yang selama ini masih belum termanfaatkan.**
- **Pemindahan ibu kota** negara ke wilayah di luar Pulau Jawa **tidak akan menyebabkan kontraksi ekonomi di wilayah lain jika lokasi alternatif ibu kota memiliki sumber daya yang memadai dan keterkaitan aktivitas ekonomi positif di wilayah lain.**

## Pemindahan IKN akan Menurunkan Kesenjangan Antar Kelompok Pendapatan

Efek Pemindahan Ibu Kota terhadap  
Penurunan Kesenjangan Antar  
Kelompok Pendapatan

% Kenaikan Price of Capital	% Kenaikan Price of Labor
0.23	1.37



Pemindahan ibu kota ke provinsi alternatif akan menyebabkan perekonomian lebih terdiversifikasi ke arah sektor yang lebih padat karya, sehingga dapat membantu untuk menurunkan kesenjangan antar kelompok pendapatan, baik di tingkat regional maupun di tingkat nasional.



*Indikasi ketimpangan akan menyempit*

Kenaikan *price of labour* akan kemudian diiringi oleh kenaikan *marginal product of labour*



# Pemindahan Ibu Kota Hanya Akan Menyebabkan Tambahan Inflasi Nasional yang Minimal

Walaupun pemindahan ibu kota baru akan menyebabkan tekanan dari sisi permintaan, tetapi **dampak terhadap inflasi nasional akan minimal**



Tambahan inflasi nasional akibat pemindahan ibu kota baru:

**0,2%** Basis poin

Dampak inflasi di provinsi lokasi ibu kota baru akan menjadi sangat minimal jika provinsi tersebut memiliki kesiapan **infrastruktur yang lebih baik dan sektor produksi yang relatif beragam**

# Pemindahan IKN Ke Luar Jawa Akan Mendorong Perdagangan Antar Wilayah di Indonesia



Pemindahan ibu kota ke provinsi di luar Jawa akan meningkatkan perdagangan antar wilayah:

- ❖ **Perdagangan di dalam provinsi** ibu kota baru
- ❖ **Perdagangan antar provinsi** di Indonesia:
  - Dari Pulau Jawa ke Provinsi Luar Jawa
  - Antar Provinsi di Luar Jawa

Lebih dari **50%** wilayah Indonesia akan merasakan peningkatan arus perdagangan jika Ibu Kota Negara dipindah ke Provinsi yang memiliki konektivitas dengan provinsi lain yang baik



Perdagangan antar Wilayah di Indonesia akan Tumbuh dan mendorong perdagangan antar Provinsi Luar Jawa



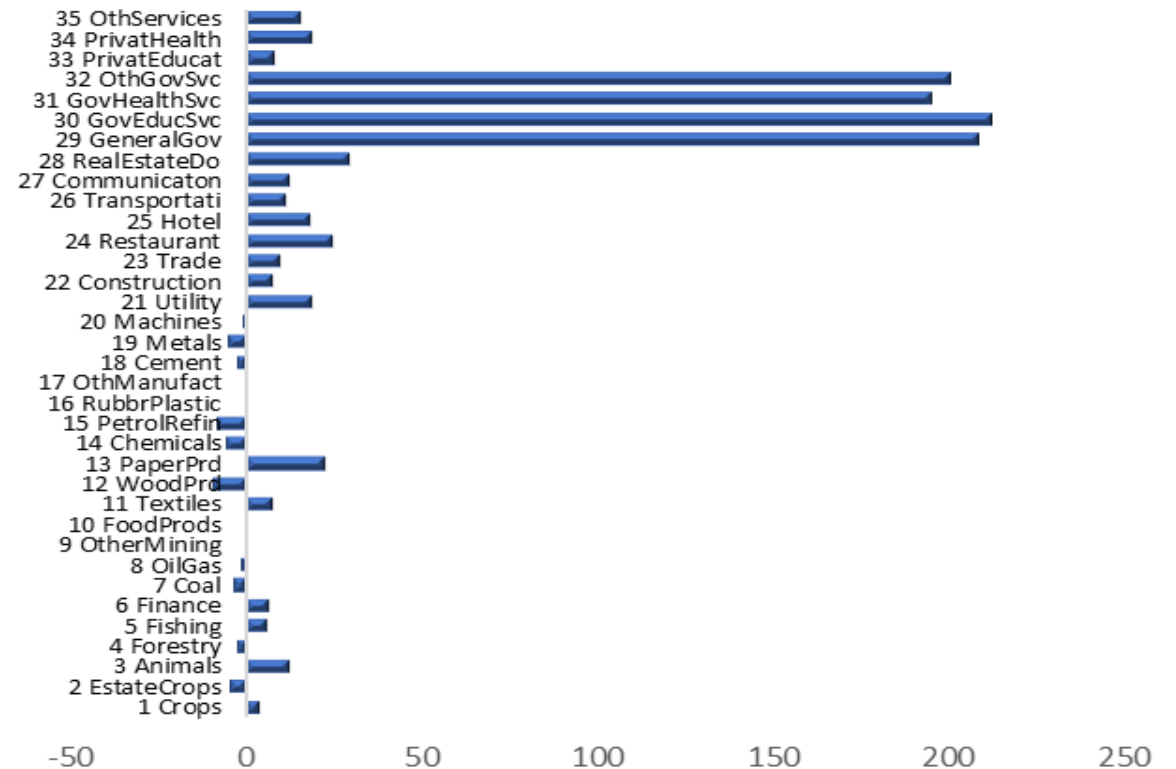
# Pemindahan IKN ke Luar Pulau Jawa akan Mendorong Investasi Di Provinsi Ibu Kota Baru dan Provinsi Sekitarnya



- **Pemindahan ibukota negara ke provinsi baru** akan menciptakan dorongan investasi yang lebih luas pada wilayah lain
- Keterkaitan ekonomi provinsi ibu kota baru dengan Provinsi lain disekitarnya akan menjadi salah satu pendorong investasi di provinsi lain

Selain itu.....

Pemindahan ibu kota negara Ke Luar Pulau Jawa akan meningkatkan output beberapa sektor non-tradisional, terutama Sektor Jasa



# Pengalaman Dampak Ekonomi Pemindahan Ibu Kota Negara Brazil

Quistorff (2015) melakukan estimasi dampak pemindahan ibukota Brazil dari Rio de Janeiro ke Brasilia pada tahun **1960**. Studi tsb menunjukkan bahwa tidak ada kerugian ekonomi yang dialami **Rio de Janeiro**, sedangkan **Brasilia** mengalami dampak positif yang signifikan berupa:

## Rio de Janeiro -> Brasilia (1960)

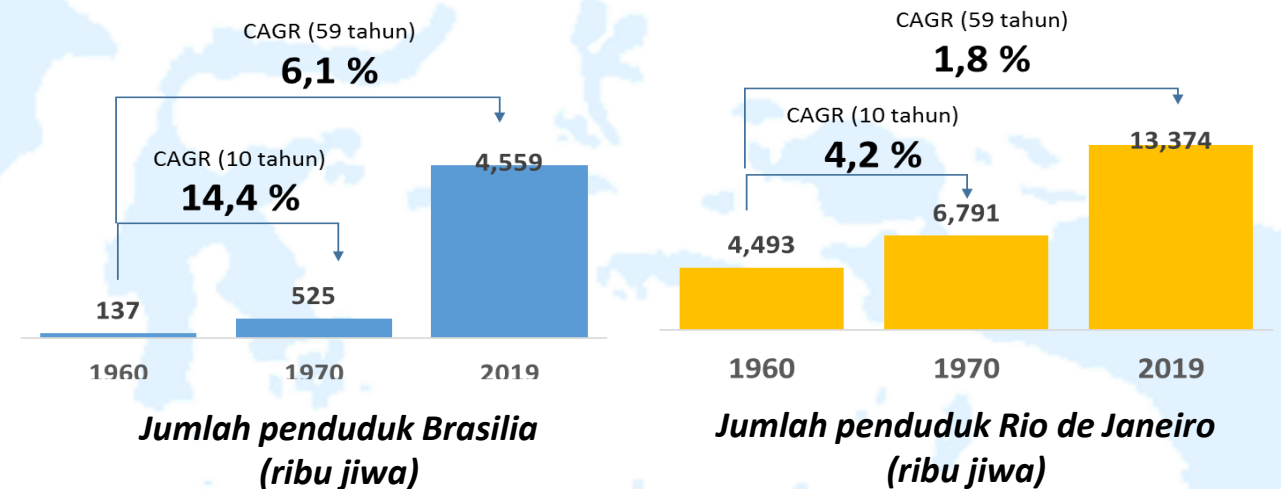
- Peningkatan populasi Brasilia**



Tahun	Jumlah Populasi (orang)
1955	69.669
1960	136.643
2019	4.558.991

- 10 tahun awal pasca pemindahan ibu kota, **pertumbuhan penduduk Brasilia per tahun mencapai 14,4%** dibandingkan Rio de Janeiro yang hanya **4,2%**

Sumber: Brazilian Institute of Geography and Statistics, World Urbanization Prospects



**Efek pengganda output sebesar 2.93**



**Efek pengganda lapangan kerja**  
1.7 pekerjaan swasta tercipta dari setiap penambahan pekerjaan di sektor publik

# Kesimpulan

1. Investasi pembangunan ibu kota baru akan memberikan efek pengganda terhadap perekonomian nasional sekitar:

*Output Multiplier:* **2,3\***

*Employment Multiplier:* **2,9\***

2. Pemindahan ibukota ke luar pulau Jawa akan mendorong penurunan kesenjangan antar wilayah, karena:
  - Mendorong perdagangan antar wilayah, terutama perdagangan antara pulau Jawa dengan wilayah di luar pulau Jawa serta antar wilayah di luar pulau Jawa
  - Mendorong investasi terutama di provinsi ibukota negara baru dan provinsi sekitarnya.
  - Mendorong diversifikasi ekonomi, sehingga tercipta dorongan nilai tambah ekonomi pada sektor non-tradisional di provinsi tersebut.
3. Dampak ekonomi dari pemindahan ibukota akan lebih maksimal jika dibarengi dengan peningkatan produktivitas, inovasi dan teknologi di provinsi terpilih dan provinsi sekitarnya.
4. Konektivitas perdagangan antara daerah di luar pulau Jawa perlu ditingkatkan terutama antara daerah yang menjadi lokasi ibu kota negara baru dengan daerah-daerah disekitarnya bahkan ke daerah yang menjadi sasaran pemerataan pembangunan seperti kawasan Indonesia timur.

\*: type II Multiplier

# 3

## Skema Pembiayaan



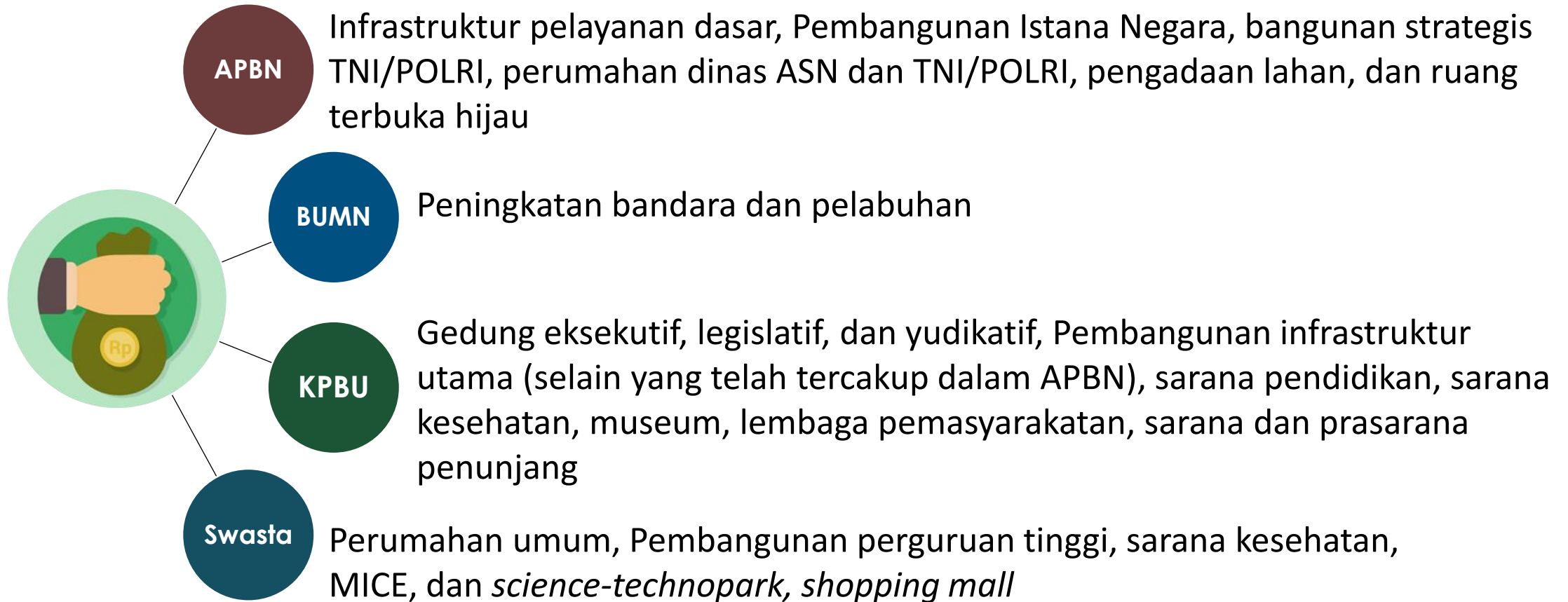


# Estimasi Pembiayaan Ibu Kota

No.	Kebutuhan Infrastruktur	Skenario I	Skenario II
1	Fungsi Utama: Gedung legislatif, eksekutif, dan yudikatif)	32,7 T	20,0 T
2	Fungsi Pendukung: Gedung dan rumah ASN/POLRI/TNI, fas. pendidikan dan kesehatan	265,1 T	182,2 T
3	Fungsi Penunjang: Fasilitas sarana dan prasarana	160,2 T	114,8 T
4	Kebutuhan Pengadaan Lahan	8 T	6 T
	<b>Total</b>	<b>466 T</b> <b>(USD 32,9 Billion)</b>	<b>323 T</b> <b>(USD 22,8 Billion)</b>

**Belum termasuk biaya Lain terkait Pemindahan Ibukota Negara:** Biaya operasional pemerintahan selama masa konstruksi; Biaya operasional pemerintahan selama masa transisi.

# Skema Pembiayaan Pemindahan Ibu Kota



# Estimasi *Cost Project* dan Pembiayaan Fisik Ibu Kota Negara (Estimasi Awal)

No.	Komponen	Cost Project (Rp T)	Sumber Pembiayaan		
			APBN (Termasuk PNBP- Earmark/ Manajemen Aset)	Skema KPBU	Swasta (Skema Kerja Sama Pemanfaatan)
<b>A. Fungsi Utama:</b>	1. Gedung legislatif	51,1		v	
	2. Gedung eksekutif			v	
	3. Gedung yudikatif			v	
	4. Istana Negara dan bangunan strategis TNI/POLRI		v		
	<b>B. Fungsi Pendukung:</b>				
1. Rumah dinas (bertingkat & Rumah Tapak ASN & TNI/POLRI)	233,7	v	v	v	
2. Sarana Pendidikan (SD, SMP, & SMA)			v	v	
3. Sarana Pendidikan (Perguruan Tinggi)			v	v	
4. Sarana Kesehatan			v	v	
5. Lembaga Pemasarakatan			v		
<b>C. Fungsi Penunjang:</b>	1. Sarana dan prasarana (jalan, listrik, telekomunikasi, air minum, drainase, pengolah limbah, sarana OR)	169,2		v	
	2. Ruang terbuka hijau	4,0	v		
	<b>D. Pengadaan Lahan</b>	8,0	v		
	<b>Total</b>	<b>466,0</b>			

Keterangan: *Cost project* bandar udara dan pelabuhan pembiayaannya melalui BUMN.

## Infrastruktur yang Dibutuhkan



### Utilitas

- Saluran Multifungsi
- Penerangan
- Air Bersih dan Minum
- Listrik
- Jalan
- dll

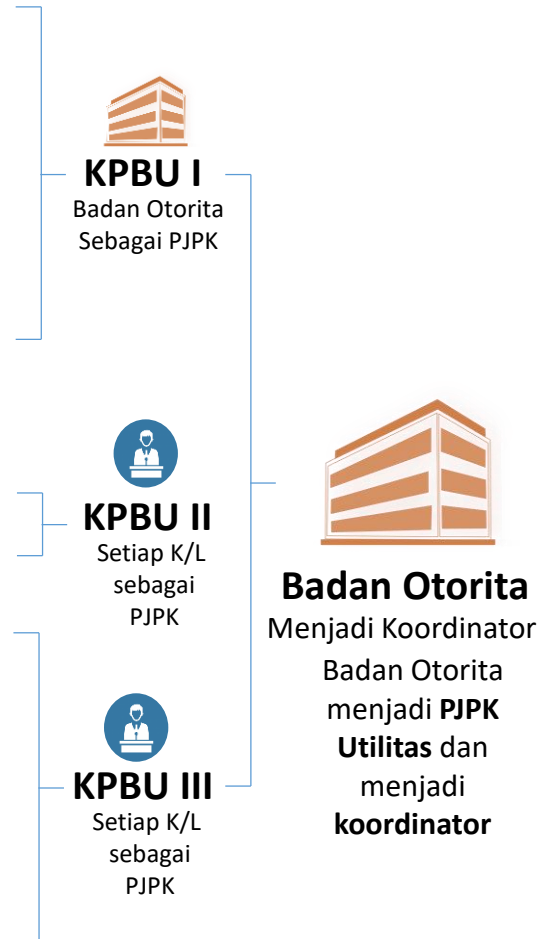


### Gedung Perkantoran

(Eksekutif, Legislatif, Yudikatif)

### Fasilitas Publik

- Rumah Sakit
- Olahraga/Kesenian
- Sekolah
- Perpustakaan
- Urban Transport
- Pasar
- Rusunawa
- Dll

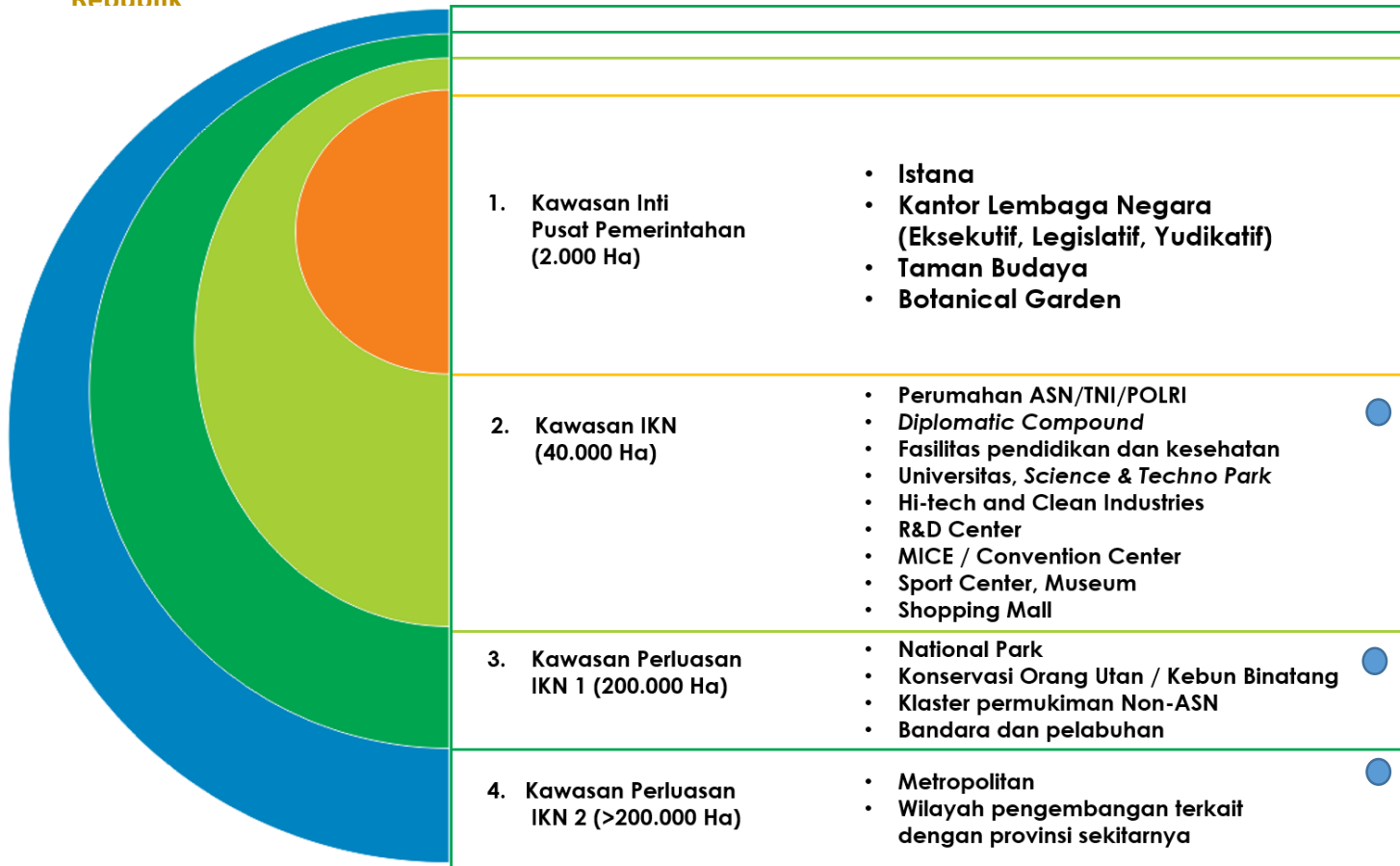


## Keterangan :

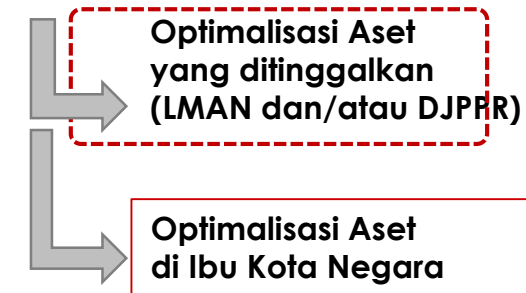
- Pembagian PJPK **dibagi** berdasarkan pengelompokan **jenis infrastruktur** yang diperlukan (**Utilitas, Fasilitas Pemerintahan, dan Fasilitas Publik**)
- Diperlukan **pembentukan Badan Otorita** untuk mempermudah pengelolaan **management Aset** dan **Funding** untuk Proyek KPBU Utilitas;
- Untuk **Fasilitas Pemerintahan** dan **Fasilitas Publik** akan **diserahkan** kepada masing-masing **sektor** dengan **rencana optimalisasi**;
- **Badan Otorita** akan menjadi **Koordinator** bagi seluruh PJPK yang terlibat dalam pemindahan Ibu Kota;



# Optimalisasi Pada Aset Pemerintah



## Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP)



## Optimalisasi Aset Dilakukan dengan Cara :

- Sewa
- Pinjam pakai
- Kerjasama pemanfaatan



Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah

- Optimalisasi dapat dilakukan pada aset di Ibu Kota Lama\* (Jakarta) dan di Ibu Kota Baru pada zona yang sudah ditentukan (Kawasan IKN, Kawasan Perluasan IKN 1, dan Kawasan Perluasan IKN 2)

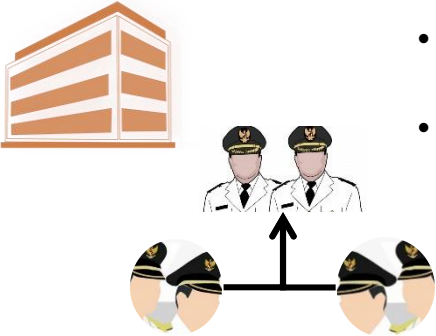
\*Aset di Jakarta dikelola oleh LMAN sedangkan di Ibu Kota Baru oleh Badan Otorita

# Kesimpulan Skema Pembiayaan

- 1. Pembiayaan Ibu Kota Negara tidak akan didominasi oleh APBN, tetapi mengutamakan peranan swasta, BUMN dan Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU)**
- 2. Pembiayaan yang bersumber dari APBN dilakukan secara *multi years* dan tidak akan mengganggu program prioritas nasional lainnya**
- 3. Pemerintah akan mengundang kerjasama dengan swasta untuk pemanfaatan dan optimalisasi aset**

# Catatan Penting Lainnya

## Proyek Multisektor, Multi PJPK, Kewenangan Pusat-Daerah



- Perlu ada otorita sendiri (Badan Otorita)
- Perlu penetapan siapa PJPK nya untuk infrastruktur gedung legislatif dan gedung yudikatif (MA, MK, KY, Kejaksaan); dll

## Kesiapan SDM, ASN maupun Konsultan Penyiapan/Transaksi



- Perlu capacity building Tim KPBU dan Panitia Lelang ASN
- Perlu penguatan kapasitas konsultan nasional
- Perlu Asistensi dan fasilitasi penyiapan proyek oleh Kantor Bersama

## Integrasi antar proyek KPBU, Integrasi antara proyek KPBU dengan Proyek lainnya



- Perlu adanya prioritas
- Perlu adanya time schedule proyek yang harmoni

## Indikasi Awal Kebutuhan Regulasi



- Perubahan Undang-Undang Ibu Kota
- Peraturan Pembentukan Badan Otorita
- Penyempurnaan Peraturan Terkait (Cth : Regulasi KPBU)

**Perlu ada kajian yang lebih mendalam....**



Republik  
Indonesia



Kementerian PPN/  
Bappenas

Terima Kasih

